

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Makna Persepsi.

Persepsi pada hakekatnya adalah merupakan proses penilaian seseorang terhadap obyek tertentu, menurut Young “persepsi merupakan aktivitas pengindra, mengintegrsikan, dan memberikan penilaian terhadap obyek-obyek fisik maupun obyek sosial, dan penindern tersebut tergantung pada stimulus phisik maupun stimulus sosial yang ada di ingkungannya¹

Sebagaimana dikatakan dalam bab pendahuluan, hukum pada awalnya berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakat, tetapi dalam perkembangannya hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Hukum dimanapun akan tumbuh dari cara hidup, pandangan hidup dan kebutuhan hidup masyarakatnya, sehingga hukum akan tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya; Hal ini sebagaimana diajarkan Rouscoe Pound, bahwa hukum itu adalah *lembaga kemasyarakatan* untuk memenuhi kebutuhan sosial.² Pandangan yang demikian berbeda dengan konsep hukum aliran sejarah yang dikemukakan oleh pendirinya Friedrich Von Savigny, dimana hukum di pandang sebagai ekspresi dari kesadaran hukum rakyat atau *Volksgeist* (jiwa bangsa). Yang dimaksud *Volksgeist* adalah falsafah hidup suatu bangsa atau pola kebudayaan yang tumbuh akibat pengalaman dan tradisi dimasa lampau. Hukum itu tumbuh *bersama pertumbuhan masyarakat, menjadi kuat bersama kuatnya suatu bangsa*. Hukum tersebut akan hilang bersama-sama dengan lenyapnya nasionalitas.³ Hukum dipahami sebagai suatu yang tumbuh dan berkembang secara alamiah dari dalam pergaulan masyarakat. Perundang-Undangan sebagai suatu cara pembuatan hukum secara sadar dengan sengaja dianggapnya sebagai suatu aktivitas yang tidak wajar, sehingga sesungguhnya tidak lebih hanya memberikan pengesahan saja

¹ <http://www.infoskripsi.com/article/pengertian-persepsi.html>

² Sunarjati Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum* (Bandung, Alumni, 1968) halaman.58

³ Sulaiman Nitiatma, *Hukum Yang Baik*, (Semarang, GUPPI –Undaris- 1997) halaman 29

terhadap norma-norma yang di bentuk secara informal oleh pergaulan hidup itu sendiri.⁴

Konsep hukum sebagaimana diuraikan diatas, hidup dalam masyarakat yang masih sederhana, sedangkan konsep hukum sebagai sarana (instrumen) merupakan konsep hukum yang hidup dalam masyarakat modern, dimana konsep perkembangan masyarakatnya di dasarkan pada perencanaan untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang dibuat tersebut dalam upaya pencapaiannya selanjutnya di wujudkan melalaui hukum. Fungsi hukum yang bukan lagi sekedar untuk memantapkan kondisi-kondisi dan kenyataan-kenyataan yang sudah ada, melainkan lebih dari itu, hukum di pergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan dan penataan kembali segala sesuatu yang semula sudah mapan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, para ahli hukum dalam perkembangannya selanjutnya mengajukan dua konsep tentang peran hukum, di mana hukum tidak saja berperan sebagai *as a tool of social control* atau berperan untuk mempertahankan apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat, tetapi hukum juga berperan sebagai *a tool of social engineering*, yaitu berperan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat, yang oleh Mochtar Kusuma Atmadja dipahami sebagai sarana pembaharuan masyarakat hukum bertugas sebagai penyalur kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan.

Dalam proses pengadilan perkara pidana yang berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan dan mewujudkan kebenaran materiil, sering muncul keluhan ketidakadilan dari pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Proses mengadili dalam perkara pidana merupakan proses interaksi nalar hukum dan batin untuk mencapai puncak kearifan dalam memutus suatu perkara. Putusan

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung, Angkasa, 1980) halaman.112. Bandingkan dengan pandangan Soetandyo, *Hukum, paradigm, Dan Dinamika Masalahnya-Masalah Pluralisme Dalam Sistem Hukum Nasional*, dikatakan old societies untuk masyarakat /komunitas lokal dan hukum lokal sebelum menuju nation state, Elsam, 2002.hal.301

pengadilan dalam perkara pidana harus dapat menjelaskan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan (dalam ranah lahiriyah) dan bersalah (dalam ranah batiniyah). Menurut **Bagir Manan**, fungsi pengadilan dan peradilan dapat ditinjau dari berbagai segi:

Pertama : segi tujuan bernegara. Negara dan pemerintahan RI didirikan dengan tujuan maksud (maksud) – antara lain – memajukan kesejahteraan umum dalam wujud sebesar-besarnya kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini melekat juga pada pengadilan dan peradilan sebagai institusi yang menjalankan fungsi negara. Pengertian kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial tidak semata-mata dalam arti ekonomi melainkan meliputi juga hal-hal seperti pelaksanaan hukum yang baik, perlindungan hukum atas segala hak seseorang atau kelompok masyarakat dan memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sama tanpa membedakan kedudukan dan latar belakang.

Kedua : segi mewujudkan tujuan-tujuan hukum seperti keadilan, ketertiban, keseimbangan sosial, kepuasan pencari keadilan, dan lain-lain. Fungsi ini dipandang sebagai fungsi tradisional pengadilan dan peradilan. Suatu kemestian akan tetapi sangat tidak mudah diwujudkan. Berbagai tujuan hukum tersebut tidak selalu berjalan seiring. Pada keadaan dan waktu tertentu dapat berbeda bahkan mungkin bertentangan satu sama lain. Misalnya antara keadilan dan ketertiban. Keadilan pada umumnya bersifat kasuistik yang banyak dan bersifat rata-rata (*openbaar orde, public order*). Ada kemungkinan, demi ketertiban akan mengurangi sifat dan tuntutan keadilan. Begitu pula antara kepuasan individual dan keseimbangan sosial. Demi keseimbangan sosial, ada

kalanya harus mengurangi kepuasan individual. Kemungkinan-kemungkinan tersebut acapkali kurang disadari para pengamat. Tidak jarang bermacam-macam tujuan dituntut sekaligus tanpa mengetahui perbedaan perbedaannya, yang penting masyarakat tertarik. Semata-mata untuk membangkitkan “*social sentiment*” atau “*social solidarity*”, tanpa memperhitungkan cara mewujudkan apalagi hasilnya. Harus diakui ada berbagai keinginan dan kepentingan yang berbeda. Mengingat perbedaan-perbedaan tersebut dapat berseberangan satu sama lain, diperlukan kejernihan masing-masing tempat berbagai tuntutan, supaya tidak bercampur aduk.

Ketiga : segi menegakkan hukum. Esensi menegakkan hukum adalah menjalankan dan mempertahankan hukum. Sebagai konsekuensi menjalankan dan mempertahankan hukum, pengadilan dan peradilan wajib memutus menurut hukum. Dalam praktek keharusan memutus menurut hukum acap kali menghadapi pengadilan dan peradilan pada aneka ragam makna hukum.

B. Fungsi Hukum

Sebenarnya fungsi hukum ada kemiripan dengan konsep *restorative justice*, berkaitan dengan sistem pidanaaan, dimana selama ini belum berhasil mencapai tujuan, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat pada umumnya, bahkan lebih ekstrim pidanaaan telah gagal mewujudkan pidanaaan. Restorative Justice bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum

pelaku.

Bagi pelaku, tujuan pemidanaan adalah mengembalikan pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam kenyataannya banyak pelaku pidana kambuhan (*residivis*).

Bagi korban lebih tragis lagi, sistem pemidanaan yang berlaku sama sekali tidak memberi perlindungan atas segala derita atau kerugian akibat perbuatan pelaku tindak pidana.

Bagi masyarakat dengan masih banyaknya pelaku tindak pidana, menunjukkan gagalnya pemidanaan sebagai instrumen represif melindungi dan menjaga ketertiban dan keamanan umum.

Secara konseptual "*restoratif justice*" berisi gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip anantara lain : ⁵

Pertama : membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana (*win win solution*).

Kedua : Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera, atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukan.

Ketiga : Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang /kelompok orang terhadap seseorang/kelompok orang, oleh karena itu sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggung jawaban pada korban , bukan

⁵ Bagir Manan, *Restorative justice (suatu pengenalan)* ,Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXI No.247, Juni 2006

mengutamakan pertanggung jawab pada hukum.

Keempat : Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak dengan cara-cara lebih informal dan personal.

Mengutip pendapat Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan “Praktek mediasi tidak bertentangan dengan tujuan atau fungsi hukum seperti fungsi memulihkan ketentraman, memelihara perdamaian dalam masyarakat, karena itu sangat baik kalau dijalankan. Lebih dari itu upaya damai/mediasi semacam itu harus membawa konsekwensi hukum yaitu menutup perkara begitu dicapai perdamaian. *Doktrin yang mengatakan sifat pidana tidak hapus sehingga perkara akan tetap di teruskan walau ada perdamaian, mestinya dihapuskan. Dapat saja sifat pidana tidak hapus tetapi perdamaian menghilangkan atau menghapuskan hak menuntut/memperkarakan.* Demikian juga dengan pemahaman hukum sering terjadi karena terdapat perbedaan persepsi dalam masyarakat, bahasa berdasarkan “rasa keadilan masyarakat” akan berbeda dengan keadilan apa yang dimaksud dalam peraturan perundangan dalam paradigma posististik.